

**ANALISIS *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP
PENGELOLAAN WISATA RELIGI (STUDI KASUS
MAKAM IBU AGUNG SITI FATIMAH AMBARIYAH
DI DESA BUKUR KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Manajemen Dakwah



NIM. 30622064

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**ANALISIS *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP
PENGELOLAAN WISATA RELIGI (STUDI KASUS
MAKAM IBU AGUNG SITI FATIMAH AMBARIYAH
DI DESA BUKUR KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Manajemen Dakwah



NIM. 30622064

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yassir

NIM : 30622064

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN WISATA RELIGI (STUDI KASUS MAKAM IBU AGUNG SITI FATIMAH AMBARIYAH DI DESA BUKUR KABUPATEN PEKALONGAN)”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 4 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Yassir
NIM. 30622064

NOTA PEMBIMBING

Ahmad Hidayatullah, M.Sos.
Jln. Wangandowo, Kec. Bojong,
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51182

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Saudara Yassir

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Prodi Manajemen Dakwah
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

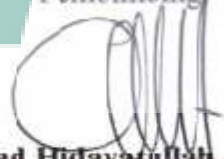
Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : YASSIR
NIM : 30622064
Judul : **Analisis *Good Governance* Terhadap Pengelolaan Wisata Religi (Studi Kasus Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah Di Desa Bukur Kabupaten Pekalongan).**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqpsahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Juni 2026

Pembimbing


Ahmad Hidayatullah, M.Sos.
NIP. 199003102019031013

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab- latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Śā	s	s (dengan titik diatasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā	h	h (dengan titik di
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Žal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Şād	ş	s (dengan titik di

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Dād	d	d (dengan titik di
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di
ظ	Zā	z	z (dengan titik di
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*,

masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + wāwu mati ditulis *au*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أأنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan.

Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materiil maupun moril dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihakpihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat kesehatan, kekuatan, serta kemudahan yang telah Engkau berikan. Tanpa pertolongan dan ridha-Mu, proses panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak akan mampu saya lalui. Segala puji hanya bagi-Mu yang selalu menuntun setiap langkah hidup saya.
2. Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Rohali dan Ibu Robiyatun, sosok luar biasa yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup saya. Terima kasih atas doa yang tiada henti, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tak ternilai, serta dukungan dan kepercayaan yang selalu diberikan. Kalian adalah alasan saya untuk terus berjuang dan tidak menyerah, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada keluarga besar saya, yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan doa. Kebersamaan serta semangat dari keluarga menjadi penguat dalam setiap proses yang saya jalani hingga sampai pada tahap ini.
4. Bapak Ahmad Hidayatullah, M.Sos., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah dengan sabar meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, motivasi, dan kesabaran yang telah diberikan sehingga saya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

5. Untuk seseorang, terima kasih atas kesabaran, pengertian, serta dukungan yang selalu diberikan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan penyemangat di saat saya merasa lelah. Kehadiranmu menjadi salah satu motivasi terbesar dalam menyelesaikan karya ini.
6. Teman-teman wonderful, PHH Gank, dan belum punya nama yang telah bersama-sama melewati proses panjang perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, diskusi, canda tawa, serta saling menguatkan dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Semoga perjuangan kita semua membuahkan hasil yang terbaik.



MOTTO

"وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ"

"Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati."

(QS. Al-Hajj: 32)

"إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ"

"Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan (baik/profesional) dalam segala sesuatu."

(HR. Muslim)



ABSTRAK

Yassir, 30622064. Analisis *Good Governance* terhadap Pengelolaan Wisata Religi (Studi Kasus Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah di Desa Bukur Kabupaten Pekalongan). Skripsi, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Dosen Pembimbing Ahmad Hidayatullah M.Sos.

Kata Kunci: *Good Governance*, Wisata Religi, Pengelolaan,

Wisata religi memiliki nilai spiritual, historis, serta potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah di Desa Bukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu destinasi wisata religi yang ramai dikunjungi peziarah, terutama karena keunikannya sebagai makam tunggal seorang tokoh perempuan. Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh sistem pengelolaan yang optimal. Permasalahan yang masih ditemui antara lain belum tertatanya fasilitas secara maksimal, keterlibatan masyarakat lokal yang masih terbatas, serta kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan wisata religi.

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengelolaan wisata religi di Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah Desa Bukur Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?, (2) Bagaimana analisis *good governance* dalam pengelolaan wisata religi di Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah Desa Bukur Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan? Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan pengelolaan wisata religi di Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah, dan (2) Untuk menganalisis pengelolaan wisata religi berbasis *good governance* di Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan juru kunci, pengelola wisata, pemerintah desa, warga sekitar, dan pengunjung. Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum (*rule of law*).

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, pengelolaan wisata religi di Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah pada dasarnya telah mencakup empat fungsi manajemen. Perencanaan dan pengorganisasian sudah berjalan cukup baik, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan secara berjenjang. Namun, pelaksanaan keempat fungsi tersebut belum terintegrasi secara optimal. Kedua, hasil analisis penerapan prinsip *good governance* menunjukkan bahwa prinsip partisipasi dan transparansi sudah mulai diterapkan dan berjalan cukup baik, sementara prinsip akuntabilitas dan aturan hukum (*rule of law*) masih lemah, terutama dalam pengelolaan keuangan, pelaporan, dan regulasi formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola melalui penataan kelembagaan, peningkatan peran pemerintah desa, serta pelibatan masyarakat secara lebih aktif agar pengelolaan wisata religi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

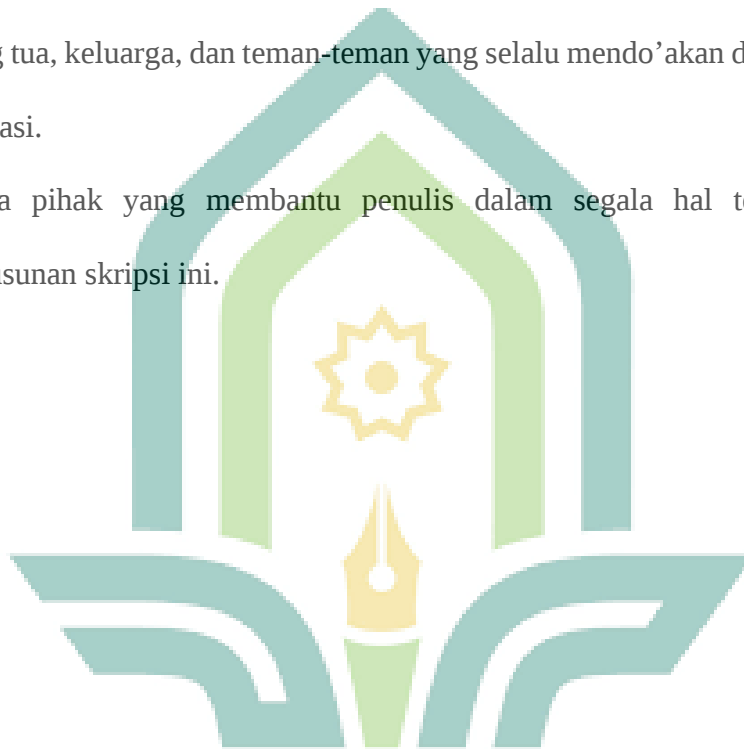
Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat-Nya yang tak ternilai serta hidayah-Nya. Sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PENGELOLAAN WISATA RELIGI (STUDI KASUS MAKAM IBU AGUNG SITI FATIMAH AMBARIYAH DI DESA BUKUR KABUPATEN PEKALONGAN)”** penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir dan salah satu syarat menyelesaikan studi program Strata Satu (S1), Program Studi Manajemen Dakwah (MD), Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD), Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa adanya do’a, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang tak henti-hentinya memberikan kenikmatan hidup, kesehatan, kekuatan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Dr. Tri Astutik Haryati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Hanif Ardiansyah, M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, serta

Dosen Pembimbing akademik penulis yang selalu memberi nasihat dan dukungannya.

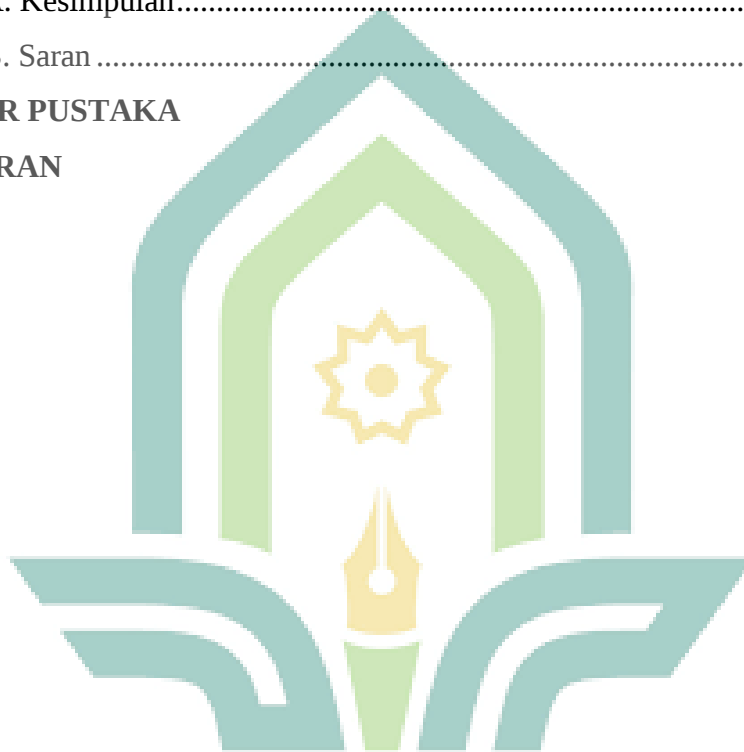
5. Bapak Ahmad Hidayatullah, M.Sos selaku sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah UIN K.K. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan juga selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyetujui judul penelitian saya.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.
7. Orang tua, keluarga, dan teman-teman yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi.
8. Semua pihak yang membantu penulis dalam segala hal terutama dalam penyusunan skripsi ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II LANDASAN TEORI	28
A. <i>Good Governance</i>	28
B. Pengelolaan Wisata Religi.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Desa Bukur	44
B. Pengelolaan Wisata Religi Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah.....	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	67
A. Analisis Pengelolaan Wisata Religi Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah Di Desa Bukur Kabupaten Pekalongan.....	67
B. Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Pengelolaan Wisata Religi Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah Di Desa Bukur Kabupaten Pekalongan.....	70
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Berfikir	20
Bagan 3.1 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Bukur Kecamatan bojong Kabupaten Pekalongan	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi wisata religi yang sangat besar, seiring dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Masyarakat Indonesia hingga kini masih menjunjung tinggi nilai-nilai penghormatan terhadap peninggalan sejarah masa lampau, salah satunya melalui keberadaan wisata religi. Keberadaan wisata religi tidak hanya berfungsi sebagai sarana spiritual dan budaya, tetapi juga menjadi bagian dari sektor pariwisata. Pariwisata sendiri merupakan potensi strategis dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sektor pariwisata, termasuk wisata religi, menjadi sektor penting yang memberikan dampak signifikan bagi perekonomian, baik di tingkat nasional maupun global.¹ Menurut UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*), jumlah wisatawan internasional pada tahun 2024 mencapai sekitar 1,4 miliar orang, meningkat 11 persen dibanding tahun sebelumnya, dan terus bertambah pada awal 2025.² Di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPAR), mencatat kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2024 mencapai 13,9 juta orang, sementara perjalanan wisatawan nusantara lebih dari 1 miliar kali. Capaian ini memberi devisa sekitar 16,7 miliar dolar AS dengan kontribusi pada PDB lebih dari 4 persen. Untuk tahun 2025, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah wisatawan dan devisa yang lebih tinggi.³ Dengan hal ini Jika suatu objek pariwisata di kelola oleh pemerintahan dengan baik, maka dampak positif akan terwujud pada daerah yang berada di sekitar wisata tersebut, salah satunya adalah wisata religi Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah.

¹ Islamiyah, M., & Holis, H. (2023). Potensi wisata religi Syaikhona Haulil Bangkalan pada pengembangan UMKM. *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, dan Antropologi*, 2(1). Hlm. 29-39.

² https://en.unwto-ap.org/news/worldtourismbarometer_jan2025/.

³ <https://www.antaranews.com/berita/4635517/kemenpar-sukses-jaga-pertumbuhan-wisatawan-dalam-100-hari-kerja>.

Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah yang terletak di Desa Bukur, Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu destinasi wisata religi yang memiliki nilai historis, spiritual, dan kultural yang tinggi bagi masyarakat setempat maupun peziarah dari luar daerah. Dan pada sekitar tahun 1990-an disaat haul pertama diadakan, hal ini menjadikan makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah sedikit demi sedikit semakin dikenal oleh masyarakat, hal itu dapat dilihat dari pengunjung yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu.⁴ Pada makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah ini tidak hanya menjadi tempat ziarah bagi masyarakat setempat, akan tetapi juga menarik berbagai pengunjung dari berbagai daerah. Makam ini merupakan makam tunggal wanita, sehingga cukup menarik karena jarang sekali di temukan makam wanita yang dijadikan tempat ziarah. Walaupun makam tunggal, banyak orang yang mengunjungi makam tersebut untuk berziarah atau hanya sekedar sowan, Pada makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah.⁵ Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah pengunjung yang cukup signifikan, terutama pada momen-momen tertentu seperti hari besar keagamaan. Namun demikian, peningkatan jumlah kunjungan tersebut belum diimbangi dengan pengelolaan yang optimal. Hal ini terlihat dari belum tertatanya fasilitas secara maksimal, keterlibatan masyarakat lokal yang masih terbatas dalam pengelolaan, serta kurangnya transparansi dalam sistem pengelolaan, khususnya dalam aspek pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi wisata yang besar dengan tata kelola yang belum berjalan.

pengelolaan pariwisata, khususnya wisata religi, penerapan prinsip *good governance* menjadi aspek yang sangat penting. *Good governance* mencakup prinsip-prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas,

⁴ Satrio, D., Citradika, D. P., & Rakhmatika, D. (2025). Pendampingan Dalam Upaya Peningkatan Daya Tarik Wisata Religi Melalui Konten Video Pendek. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 3(4), 1180-1188.hlm.1182.

⁵ Saputra, Y. (2024). *Strategi Pengembangan Untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisata Religi (Studi Kasus Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah Desa Bukur Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).hlm.4.

dan penegakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Pengelolaan wisata religi yang berbasis pada prinsip-prinsip tersebut diyakini mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kepercayaan publik, serta mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan destinasi wisata. Selain itu, konsep *good tourism governance* juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pengelolaan yang inklusif dan berkelanjutan.⁶ Pengembangan sarana dan prasarana menjadi hal utama yang harus disediakan oleh pariwisata untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung, sehingga dapat menikmati perjalanan wisata dengan baik⁷. Dengan demikian, keberhasilan suatu destinasi wisata religi tidak hanya ditentukan oleh jumlah kunjungan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang mampu menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Wisata religi diartikan sebagai wujud kegiatan pariwisata yang dilaksanakan dengan cara mendatangi tempat-tempat yang mempunyai nilai dan makna spiritual tertentu, seperti candi, kompleks pemakaman, maupun masjid.⁸ Aktivitas ini juga dapat dipahami sebagai lintasan keagamaan yang bertujuan untuk mencukupi keperluan batin dan spiritual, sehingga kondisi kejiwaan yang gersang dapat kembali memperoleh ketenangan melalui nilai-nilai religius. Wisata religi dapat diwujudkan melalui kunjungan ke makam ke tokoh masyarakat, ke makam para ulama, serta ke berbagai situs bersejarah yang berkaitan dengan perkembangan Islam. Wisata ini lebih mengacu pada ziarah, dengan tujuan untuk hadir dan bertemu (mengunjungi makam/ kubur). Makam yang biasa di ziarahi ialah makam-makam orang yang pada masa hidupnya

⁶ Hajar, S., Faustyna, F., & Haulik, K. (2022). Muslim-friendly tourism towards good tourism governance. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 142-161.hlm.151.

⁷ Mahfudz, M. (2023). Dampak Ekonomi terhadap Pengembangan Wisata Religi Masjid Al-Alam Kota Kendari. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(1). Hlm. 262.

⁸ Abduh, M. (2021). Pengelolaan Masjid Agung Islamic Center Sebagai Objek Wisata Religi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1). Hlm. 43.

memberikan kesejahteraan dan memperjuangkan kebenaran untuk masyarakat atau kemanusiaan.⁹

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan wisata religi dalam perspektif *good governance*. Penelitian oleh Akbar,¹⁰ menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan wisata religi dapat meningkatkan kualitas fasilitas serta daya tarik wisata. Selain itu, penelitian lain juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keberlanjutan wisata religi, khususnya dalam menciptakan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat lokal. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek pengembangan wisata dan dampak ekonomi, sementara kajian yang secara khusus menyoroti permasalahan tata kelola internal seperti kurangnya transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah pengunjung dengan kualitas pengelolaan masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang menunjukkan bahwa analisis mendalam mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan wisata religi, khususnya pada konteks lokal seperti Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah, masih belum banyak dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara komprehensif penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan wisata religi di Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas telah diterapkan, serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi strategis bagi pengelola dan

⁹ Nuraini, P. (2023). Pengelolaan Objek Wisata Religi Makam Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(6). Hlm. 1575

¹⁰ Akbar, I. F., Erwin, E., & Hidayatullah, A. (2022). Implementation of *Good governance* and Strategy for the Development of Religious Tourism of Prince Benowo's Cemetery in Improving the Economy of the People. *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 4(2), 68-81.hlm.76.

pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas tata kelola wisata religi yang lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan wisata religi serta memberikan solusi yang relevan guna mengoptimalkan pengelolaan destinasi wisata religi secara lebih efektif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan wisata religi makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah di desa Bukur?
2. Bagaimana perspektif analisis *good governance* pada wisata religi makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah di desa Bukur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah di sebutkan di atas, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang di inginkan, di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wisata religi yang berada di makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah di desa Bukur
2. Untuk mengetahui perspektif analisis *good governance* dalam wisata religi makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah di desa Bukur

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan pada bidang administrasi publik, tata kelola pemerintahan desa, serta pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Khususnya, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori *good governance* dalam konteks wisata religi di wilayah pedesaan. Hasil dari penelitian ini juga bisa menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang tertarik pada kajian serupa, baik pada tema *governance*, partisipasi masyarakat, maupun pengembangan desa wisata berbasis budaya dan spiritual.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai usulan dan rekomendasi kebijakan terhadap Pemerintah Desa Bukur, pengelola wisata religi, serta pihak terkait lainnya untuk memperbaiki sistem tata kelola

pengelolaan wisata religi. Dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara optimal, diharapkan pengelolaan Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan partisipatif, serta mampu mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat secara berkelanjutan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

a. Good Governance

Good governance merupakan suatu prinsip di mana kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh masyarakat, namun tetap berada dalam kerangka pengawasan dan pengaturan oleh negara. Dalam penerapannya, sistem pemerintahan harus mampu beroperasi dengan efektif dan efisien, serta mengedepankan transparansi, keterbukaan terhadap partisipasi publik, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk bersinergi dengan rakyat dan menunjukkan komitmennya dalam menjamin kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, penyediaan layanan publik menjadi kewajiban mutlak setiap lembaga pemerintahan, mengingat mutu layanan publik merupakan elemen dasar bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Secara lebih luas, *good governance* juga dapat dipahami sebagai suatu konsep ideologi politik yang mencakup seperangkat prinsip fundamental yang seharusnya dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Good governance dapat diartikan sebagai proses pengelolaan kepentingan publik yang dijalankan secara terbuka, bertanggung jawab, inklusif, adil, dan efisien, dengan tujuan utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Gagasan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan elemen masyarakat sipil dalam proses pembuatan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan pandangan dari *United Nations Development Programme* (UNDP), prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang ideal. Dalam publikasinya yang berjudul “*Governance for Sustainable Human Development*”, *United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu bentuk pemanfaatan kekuasaan dalam bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengatur berbagai urusan kenegaraan di seluruh jenjang pemerintahan. Konsep ini mencakup sistem, proses, serta lembaga yang memungkinkan individu maupun kelompok dalam masyarakat untuk menyuarakan kepentingan mereka, menegakkan hak-hak hukum yang dimiliki, menjalankan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, serta menyelesaikan perbedaan yang muncul di antara berbagai pihak. Konsep *good governance* mulai populer dan diarusutamakan pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, terutama setelah banyak lembaga internasional seperti Bank Dunia dan UNDP mengadopsinya sebagai prasyarat bagi pemberian bantuan pembangunan. Meskipun tidak ada satu "tokoh pendiri" tunggal, Bank Dunia (misalnya dalam publikasi *Governance and Development*) secara signifikan mempopulerkan istilah ini dan mengaitkannya dengan efektivitas bantuan dan pembangunan berkelanjutan.¹¹

Awalnya, *good governance* banyak diterapkan dalam konteks reformasi administrasi publik dan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Namun, seiring waktu, penerapannya meluas ke berbagai sektor, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik, dan tentu saja, pengelolaan pariwisata. Dalam konteks pengelolaan wisata religi, *good governance* menjadi krusial untuk memastikan bahwa pengelolaan situs wisata religi dilakukan secara profesional, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pemangku kepentingan, sekaligus menjaga nilai-nilai spiritual dan budaya dari lokasi tersebut.

¹¹ Singh, A. (2023). A theoretical understanding of governance and *good governance*. *VIDYA-A Journal of Gujarat University*, 2(1), 39-47.hlm.43-45.

Karakteristik *good governance* adalah: Partisipasi (*Participation*), yaitu keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu kebijakan atau program. supremasi hukum (*Rule of law*) adalah pengelolaan yang berdasar pada hukum, kesepakatan, maupun aturan yang berlaku. Transparansi (*Transparency*) ialah keterbukaan suatu informasi yang dapat di akses semua pemangku kepentingan. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kewajiban pihak pengelola untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan, kebijakan, serta penggunaan sumber daya terhadap masyarakat maupun pihak berwenang. Keempat karakteristik ini terhubung saling memperkuat serta tidak dapat berarti sendiri, maka bisa di simpulkan bahwa konsep *good governance* ialah penyelenggara pemerintahan negara yang kompak serta bertanggung jawab, juga efektif dan efisien dengan menjaga keseimbangan interaksi yang positif dan tertata antar domain negara.¹²

Pinto memaknai *governance* sebagai praktik penggunaan kewenangan oleh pemerintah serta pengelolaan kekuasaan secara umum, khususnya dalam konteks pembangunan ekonomi. Selanjutnya, Ganie Rochman menjelaskan bahwa *governance* merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi yang melibatkan peran negara dan sektor nonpemerintah dalam suatu aktivitas kolektif. Lebih lanjut, Ganie menegaskan bahwa proses pengelolaan tidak hanya melibatkan negara dan pemerintah (*state*), namun juga memerlukan keterlibatan beragam pihak di luar unsur negara dan pemerintah. Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat pada tahapan tersebut sangat beragam dan luas.

Secara umum, *governance* diartikan sebagai cara penyelenggaraan kekuasaan, pengawasan, pengaturan, serta pelaksanaan pemerintahan.

¹² Widanti, N. P. T. (2022). Konsep *good governance* dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).hlm. 138-139.

Governance juga dapat dimaknai sebagai tindakan atau proses dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Selain itu, *governance* dapat dipahami sebagai pihak atau institusi yang membentuk sistem pemerintahan guna mengatur serta melaksanakan kewenangan yang dimiliki..¹³

b. Prinsip- Prinsip *Good Governance*

Dalam menganalisis penerapan *good governance* terhadap pengelolaan wisata religi maka ibu agung siti Fatimah ambariyah di desa bukur, kabupaten pekalongan, di perlukan penerapan prinsip- prinsip *good governance* yang di jalankan secara efektif dan efisien dalam pengelolaanya, di antaranya adalah:

1) Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi Artinya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan suatu kegiatan. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi penerima keputusan, tetapi ikut serta dalam menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan bahkan terlibat dalam pelaksanaan serta evaluasi. Partisipasi bisa dilakukan secara langsung, seperti melalui musyawarah, atau tidak langsung, seperti melalui perwakilan. Selain itu, partisipasi juga meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*), sehingga masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap hasil keputusan tersebut dan mendukung pelaksanaannya.

Indikator partisipasi:

- a) Adanya forum musyawarah (rapat desa, dan rembug warga.)
- b) Tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan bersama
- c) Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok rentan
- d) Adanya ruang aspirasi (kotak saran, forum terbuka, media sosial desa)
- e) Respons pemerintah/pengelola terhadap masukan masyarakat

¹³ Karso, A. J. (2022). *Buku Ajar Good governance*. Samudra Biru.hlm. 16-17.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, peneliti menemukan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat di Desa Bukur, Kecamatan Bojong, telah menunjukkan kemajuan yang positif. Hal ini tercermin dari tingginya antusiasme warga dalam mengikuti berbagai kegiatan, seperti sosialisasi dan forum musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan di daerah tersebut.

2) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan suatu keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan, proses, maupun hasil dari suatu kegiatan. Informasi tersebut harus mudah diakses, jelas, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Transparansi menuntut tidak adanya hal yang disembunyikan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat mengetahui apa yang sedang dan telah dilakukan oleh pengelola. Hal ini mendorong terciptanya pengelolaan yang jujur dan mencegah terjadinya kecurangan, karena setiap tindakan dapat dilihat dan dinilai oleh masyarakat.

Indikator transparansi:

- a) Informasi keuangan dipublikasikan secara terbuka
- b) Proses pengambilan keputusan dapat diketahui masyarakat
- c) Akses informasi mudah (papan pengumuman, dan media digital.)
- d) Tidak adanya informasi yang disembunyikan secara tidak wajar

Komunikasi yang jelas antara pengelola dan masyarakat

Keterbukaan informasi terkait keberadaan Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah di Desa Bukur Kecamatan Bojong mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan pengelolaannya, termasuk transparansi mengenai pendapatan dari kotak amal yang berasal dari sumbangan para peziarah. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat maupun kritik terhadap pengelolaan yang dilakukan, serta membuka ruang bagi keterlibatan

aktif masyarakat, terutama dalam menyampaikan aspirasi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kegiatan yang dilaksanakan.

3) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam *good governance* yang merujuk pada kewajiban setiap individu, lembaga, atau pihak yang menerima mandat atau amanah untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya kepada pihak yang memiliki hak untuk mengetahui, terutama masyarakat. Dalam konteks pemerintahan maupun pengelolaan publik, akuntabilitas tidak hanya mencakup pertanggungjawaban secara moral, tetapi juga pertanggungjawaban administratif, finansial, dan hukum. Dengan demikian, setiap kebijakan dan aktivitas yang dilakukan harus dapat dijelaskan secara rasional dan didukung oleh bukti yang valid.

Akuntabilitas mencakup beberapa aspek penting, seperti kejelasan fungsi dan pembagian tugas (*role clarity*), keteraturan dalam pelaporan kegiatan (*reporting system*), serta kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program (*performance conformity*). Selain itu, akuntabilitas juga menuntut adanya mekanisme evaluasi yang memungkinkan hasil kerja dapat diuji kebenarannya melalui indikator yang objektif. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan sekadar formalitas pelaporan, tetapi sebuah sistem yang memastikan bahwa setiap proses dapat ditelusuri dan dinilai secara transparan.

Indikator akuntabilitas:

- a) Laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses
- b) Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas
- c) Mekanisme evaluasi dan audit (formal atau informal)
- d) Adanya sanksi jika terjadi penyimpangan
- e) Kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan

4) Supremasi Hukum (*Rule of law*)

Rule of law atau supremasi hukum merupakan prinsip fundamental dalam konsep *good governance* yang menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa tidak ada satu pihak pun, baik pemerintah, pejabat publik, maupun masyarakat, yang berada di atas hukum. Semua tindakan harus tunduk pada norma, aturan, dan prosedur hukum yang telah ditetapkan secara sah. Dengan demikian, hukum menjadi dasar utama dalam mengatur hubungan sosial, politik, dan administratif dalam suatu sistem pemerintahan.

Dalam implementasinya, *rule of law* menuntut adanya penegakan hukum yang adil, konsisten, dan tidak diskriminatif. Artinya, hukum harus diberlakukan secara setara tanpa memandang status sosial, jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang individu. Selain itu, prinsip ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, di mana setiap individu memiliki hak yang dijamin oleh hukum dan harus dilindungi dari segala bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, *rule of law* tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak warga negara.

Indikator *rule of law*:

- a) Adanya aturan tertulis (perdes dan tata tertib)
- b) Penegakan aturan secara konsisten
- c) Tidak ada perlakuan istimewa (semua setara di depan hukum)
- d) Mekanisme penyelesaian konflik yang jelas
- e) Perlindungan terhadap hak masyarakat¹⁴

¹⁴ Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40-52.hlm.46-50.

c. Pengelolaan Wisata Religi

1) Pengelolaan

Istilah pengelolaan berasal dari bahasa Italia, yaitu *menegiar*, yang berarti menangani alat-alat, dan berakar dari kata Latin *manus* yang bermakna tangan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan diartikan sebagai kegiatan mengurus, mengendalikan, dan menyelenggarakan. Secara umum, pengelolaan merupakan upaya optimalisasi serta pengendalian terhadap sumber daya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Leiper, pengelolaan merujuk pada berbagai peran yang dijalankan oleh individu atau sekelompok orang, serta mencakup tugas-tugas yang berkaitan dengan peran tersebut.¹⁵

Menurut *John D. Millet*, fungsi pengelolaan merupakan suatu rangkaian proses yang mencakup kegiatan pengarahan serta penyediaan fasilitas kerja kepada individu-individu yang tersusun dalam kelompok formal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, *George R. Terry* menjelaskan bahwa fungsi pengelolaan meliputi *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), dan *Controlling* (pengawasan).¹⁶

2) Wisata religi

Wisata religi menjadi bagian dari bentuk kegiatan pariwisata yang erat kaitannya dengan nilai-nilai keagamaan dan sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Konsep wisata religi dapat dipahami sebagai aktivitas perjalanan menuju tempat-tempat yang memiliki nilai khusus bagi pemeluk agama, umumnya berupa lokasi ibadah yang memiliki karakteristik tersendiri. Kekhasan tersebut biasanya berkaitan

¹⁵ Azkiya, D. (2024). *Analisis pengelolaan wisata religi untuk mengembangkan dakwah di makam Mbah Nur Durya Bin Sayyid Moga Pemalang* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).hlm. 7-8.

¹⁶ Gunawan, D., Fathurrahim, F., Jumail, M., & Mahsun, M. (2022). Pengelolaan Wisata Religi Sebagai Daya Tarik Wisata Di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Journal Of Responsible Tourism*, 2(1), 61-66. Hlm.63.

dengan latar belakang sejarah, mitos, maupun legenda yang menyertai keberadaan tempat tersebut. Dalam praktiknya, wisata religi sering dilandasi oleh tujuan spiritual, seperti memperoleh keberkahan, mengambil pelajaran moral (ibrah), menerima nasihat keagamaan (tausiah), serta mendapatkan hikmah untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan. Namun, tidak jarang pula terdapat tujuan lain seperti keteguhan iman, memperoleh restu, kekuatan spiritual, bahkan kemakmuran yang melimpah.

Dalam konteks penelitian ini, wisata religi yang diartikan adalah kunjungan atau ziarah secara individu ataupun kelompok yang dinilai penting terkait dengan penyebaran ajaran Islam. Tujuan dari kunjungan ini bukanlah untuk memohon sesuatu, melainkan untuk mempelajari bagaimana para pendahulu berkembang menjadi dakwah yang sukses dan berpengaruh.¹⁷

2. Penelitian Yang Relevan

Tinjauan pustaka merupakan aspek penting pada penelitian karena berfungsi sebagai landasan teoritis dan pijakan konseptual bagi penulis dalam menganalisis permasalahan. Melalui kajian pustaka, penulis dapat memahami penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, sehingga penelitian ini memiliki arah yang jelas, berbeda, namun tetap berhubungan dengan kajian sebelumnya. Selain itu, tinjauan pustaka juga bertujuan untuk mengenal posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya, serta memberikan gambaran mengenai kontribusi baru yang ingin dicapai.

Sebagai dasar pengembangan penelitian, ada lima penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan topik *Analisis Good governance terhadap Pengelolaan Wisata Religi (Studi Kasus Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah di Desa Bukur, Kabupaten Pekalongan)*.

¹⁷ Sari, D. (2022). *Strategi Pengembangan Objek Wisata Religi (Studi Di Makam Teungku Diujung Desa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi).hlm.10-11.

Pertama, dari penelitian dengan judul “*Penerapan Prinsip Good governance dalam Pengelolaan Desa Wisata Sendang di Kabupaten Wonogiri*” yang di tulis oleh Indra Putri Ardilla, Asal Wahyuni Erlin Mulyadi pada tahun 2022.¹⁸ Penelitian ini membahas implementasi prinsip *good governance* pada manajemen desa wisata Sendang yang berada di Kabupaten Wonogiri dengan indikator akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat serta supremasi hukum. Penelitian ini mempunyai sinonim dengan penelitian penulis yakni sama dalam membahas tentang penerapan prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan supremasi hokum dalam pengelolaan desa wisata. Namun pada penelitian tersebut focus pada wisata secara umum, sedangkan penelitian saya focus pada wisata religi.

Kedua, dari penelitian yang di lakukan oleh Yusuf Hariyoko, Adi Soesiantoro, Revi Pravira Pangestuti pada tahu 2021 dengan judul “*Evaluasi Kebijakan Pembangunan Wisata Religi di Kabupaten Gresik*”¹⁹terdapat persamaan pada peneitian ini yakni sama sama menganalisis bagaimana kebijakan daerah mempengaruhi kualitas pengelolaan wisata religi. Namun terdapat perbedaan, pada penelitian tersebut mengkaji pada evaluasi kebijakan (berbasis kebijakan publik), sedangkan pada penelitian saya mengkaji secara spesifik mengukur *good governance*.

Ketiga, penelitian yang di lakukan oleh Ilma Fathan Akbar, Erwin, Ahmad Hidayatullah pada tahun 2022 yang berjudul “*Implementation of Good governance and Strategy for the Development of Religious Tourism of Prince Benowo's Cemetery in Improving the Economy of the People*”.

¹⁸ Ardilla, I. P., & Mulyadi, A. W. E. (2022). Penerapan Prinsip *Good governance* dalam Pengelolaan Desa Wisata Sendang di Kabupaten Wonog. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(2), 317-331.

¹⁹ Hariyoko, Y., Soesiantoro, A., & Pangestuti, R. P. (2021). *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Wisata Religi di Kabupaten Gresik (Studi Wisata Makam Sunan Giri dan Situs Giri Kedaton)*. Publika: *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 13(1), 44-51

²⁰Keduanya sama-sama membahas tentang pengelolaan wisata religi dengan objek utama berupa makam sebagai tujuan ziarah. Konsep tata kelola yang baik (*good governance*) diterapkan sebagai pendekatan untuk menilai sejauh mana transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas diterapkan dalam pengelolaan, namun terdapat perbedaan, Penelitian pada Makam Pangeran Benowo lebih berfokus pada objek wisata yang berskala lebih besar dan sudah mendapat dukungan pemerintah serta memiliki sistem kelembagaan yang lebih formal. Sementara itu, penelitian di Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah lebih menitikberatkan pada pengelolaan berskala desa dengan kondisi yang masih sederhana.

Keempat, penelitian dengan judul “*Strategi Manajemen Wisata Religi di Kalimantan Timur (Studi Kasus Makam Tunggang Parangan)*”.²¹ yang ditulis pada tahun 2022 oleh Nur Hidayah yang menjelaskan seperti apa strategi manajemen diterapkan pada pengelolaan objek wisata religi Makam Tunggang Parangan di Kalimantan Timur. Fokus pada penelitian tersebut adalah pada strategi pemasaran, pelayanan, dan penyediaan fasilitas tanpa menyinggung prinsip *good governance* secara eksplisit. Namun keduanya membahas makam lokal sebagai destinasi religi.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh alyani nadilah dengan judul “*revitalisasi situs religi makam pangeran benowo di desa penggarit kecamatan taman kabupaten pemalang (prespektif good governance)*”.²² Pada penelitian tersebut memiliki kesamaan, yang sama sama menekankan urgensi dari kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat pada pengelolaan dan pengembangan wisata religi. Namun pada penelitian tersebut

²⁰ Akbar, I. F., Erwin, E., & Hidayatullah, A. (2022). *Implementation of Good governance and Strategy for the Development of Religious Tourism of Prince Benowo's Cemetery in Improving the Economy of the People*. JKMD, 68-81.

²¹ Hidayah, N., Noorthaibah, N., & Nur, N. P. (2023). *Strategi manajemen wisata religi di Kalimantan Timur (studi kasus makam Tunggang Parangan)*. Mushawwir Jurnal Manajemen Dakwah dan Filantropi Islam, 1(1), 1-19.

²² Nadilah, A. (2023). *Revitalisasi situs religi makam Pangeran Benowo di Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang (Prespektif Good governance)* (Doctoral dissertation, UIN KH ABDURAHMAN WAHID).

menitik beratkan pada proses revitalisasi situs religi yang sebelumnya kurang mendapat perhatian pemerintah, sedangkan penelitian saya focus pada analisis pengelolaan wisata religi yang sedang berjalan dan bagaimana prinsip *good governance* di terapkan dalam pengelolaan tersebut.

kelima penelitian memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan tema yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu pengelolaan wisata religi dan penerapan prinsip *good governance*. Namun demikian, jika dianalisis lebih mendalam, terdapat dua kecenderungan utama (dua kondisi) dalam penelitian-penelitian tersebut.

Pertama, terdapat penelitian yang masih berfokus pada pengembangan dan strategi manajemen wisata religi. Hal ini dapat dilihat pada penelitian oleh Nur Hidayah (2022) yang menitikberatkan pada strategi pemasaran, pelayanan, dan penyediaan fasilitas dalam pengelolaan wisata religi. Pendekatan ini lebih bersifat praktis-operasional dan berorientasi pada peningkatan daya tarik wisata, tanpa secara eksplisit mengkaji prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, penelitian oleh Ilma Fathan Akbar dkk. (2022) juga sebagian mengarah pada aspek strategi pengembangan, meskipun sudah mulai mengintegrasikan konsep *good governance*. Dengan demikian, pada kelompok ini, fokus utama masih berada pada bagaimana wisata dikembangkan dan dikelola secara manajerial, bukan pada bagaimana tata kelola tersebut dinilai berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Kedua, terdapat penelitian yang telah mengkaji penerapan *good governance*, namun umumnya diterapkan pada objek wisata yang berskala lebih besar dan sudah berkembang. Penelitian oleh Indra Putri Ardilla & Asal Wahyuni Erlin Mulyadi (2022) serta Alyani Nadilah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat diterapkan dalam pengelolaan wisata. Namun, konteksnya masih berada pada pengelolaan yang relatif lebih mapan atau dalam tahap revitalisasi. Demikian pula, penelitian Ilma Fathan Akbar dkk. (2022) meneliti objek wisata religi yang telah memiliki dukungan pemerintah dan kelembagaan formal yang kuat. Sementara itu, penelitian Yusuf Hariyoko

dkk. (2021) lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan publik, yang menunjukkan bahwa kajian *good governance* masih berada pada tataran makro, bukan implementasi langsung di tingkat pengelola objek wisata.

Berbeda dengan kedua kecenderungan tersebut, penelitian dalam skripsi ini memiliki fokus yang lebih spesifik dan meruncing, yaitu pada analisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan wisata religi skala lokal. Objek yang diteliti berupa makam tokoh perempuan, yaitu Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah di Desa Bukur Kabupaten Pekalongan, yang memiliki karakteristik unik baik dari sisi sosial, budaya, maupun religius. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek pengembangan atau kebijakan, tetapi secara langsung mengkaji bagaimana prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum diimplementasikan dalam praktik pengelolaan sehari-hari.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian ini mengisi celah (research gap) dari penelitian sebelumnya, yaitu dengan menghadirkan kajian yang lebih kontekstual pada wisata religi lokal berbasis makam tokoh perempuan, yang selama ini belum banyak dikaji secara spesifik dalam perspektif *good governance*. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana tata kelola yang baik dapat diterapkan tidak hanya pada objek wisata berskala besar, tetapi juga pada level akar rumput (*grassroots*) dengan segala keterbatasan dan dinamika yang ada.

Berdasarkan uraian kelima penelitian relevan di atas, bahwa topik tentang pengelolaan wisata berbasis prinsip *good governance* merupakan kajian yang penting dan terus berkembang. Masing-masing penelitian memberikan kontribusi perspektif yang berbeda, mulai dari pendekatan manajerial, kebijakan publik, hingga relasi sosial dan revitalisasi situs religi. Persamaan umum dari seluruh penelitian tersebut terletak pada urgensi peningkatan kualitas tata kelola dalam pengelolaan objek wisata, termasuk wisata religi, dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dan pengelola lokal.

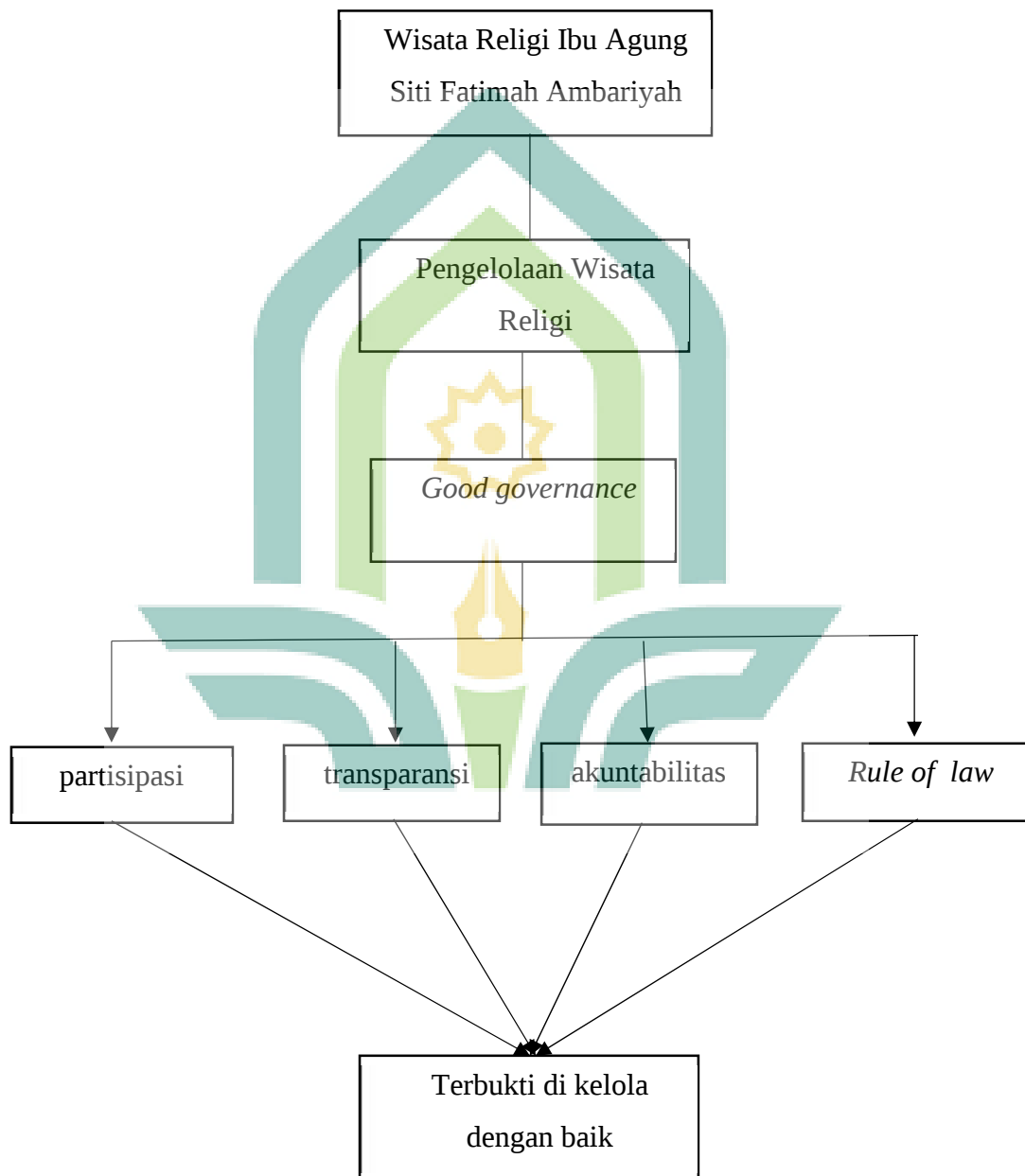
Namun demikian, penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri, yakni memfokuskan terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam konteks pengelolaan wisata religi makam Siti Ambariyah yang sedang berjalan. Penelitian ini tidak hanya mengukur sejauh mana akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum diterapkan, tetapi juga menelaah tantangan dan peluang dari sudut pandang sistem pengelolaan yang formal dan aktual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan serta berfungsi sebagai referensi bagi model tata kelola wisata religi berbasis *good governance* yang lebih ideal di tingkat lokal.

3. Kerangka Berfikir

Penelitian ini bertolak dari kenyataan bahwa wisata religi merupakan potensi besar yang tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga mempunyai dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat. Namun, keberhasilan pengelolaan wisata religi sangat ditentukan oleh tata kelola yang baik (*good governance*). Pada konteks ini, prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi menjadi indikator utama untuk menilai sejauh mana pengelolaan objek wisata religi dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan agar muncul rasa memiliki terhadap kawasan wisata. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap kegiatan dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. *Rule of law* menegaskan adanya aturan dan kebijakan yang adil dalam menjaga ketertiban dan pelestarian situs. Transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui dengan jelas kebijakan dan kegiatan yang dijalankan. Sementara itu, pemberdayaan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemampuan dan peran masyarakat sekitar agar dapat berkontribusi secara aktif. Dengan penerapan kelima prinsip tersebut, pengelolaan wisata religi Makam Siti Ambariyah diharapkan menjadi lebih efektif, terbuka, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah sebagai objek studi, memiliki posisi sentral dalam kehidupan spiritual masyarakat. Namun, muncul pertanyaan sejauh mana pengelolaan wisata religi tersebut telah dikelola dengan prinsip *good governance*, serta bagaimana dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dan peningkatan nilai kebermanfaatan ekonomi-sosial.



Bagan 1.1
Kerangka Berfikir

F. Metode penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode dengan tahapan penelitian yang berdasar pada persepsi dari suatu kejadian dengan pendekatan datanya yang menghasilkan analisis deskriptif yang bisa berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.²³ Dalam pelaksanaan ini, penelitian dilakukan di desa bukur kec bojong kab pekalongan, wawancara yang dilakukan melibatkan juru kunci, pengelola wisata, warga, pengunjung, dan juga pemerintah sekitar.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang di dapatkan secara langsung dari sumber data pertama yang berada pada tempat penelitian maupun objek penelitian.²⁴ Pada proses penghimpunan data, peneliti menghimpun data mengenai konsep analisis *good governance*. Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pengelola serta juru kunci wisata religi siti Fatimah ambariyah, pengunjung dan juga warga sekitar yang berada di dekat makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah, mereka ialah subjek dari lokasi penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan observasi lapangan dan juga dokumentasi.

b. Data skunder

Datas skunder yaitu menggunakan yang bukan di peroleh dari sumber pertama/ primer sebagai sarana untuk mempeoleh suatu informasi²⁵ data skunder adalah data yang di dapat melalui data yang telah ada sebelumnya, semacam dari buku, artikel, jurnal, laporan, dan juga

²³ Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.hlm.6.

²⁴ Rahmadi, R. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*.hlm.71.

²⁵ Hikmawati, F. (2020). *Metodologi penelitian*.hlm.19.

informasi yang terkumpul mengenai topik dan fokus penelitian. Data skunder yang di gunakan sebagai data tambahan dan data dukungan untuk pembanding dalam penelitian.²⁶ Pada penelitian yang di lakukan, peneliti mengutip dari jurna, buku, berita internet, dan artikel, kemudian data tersebut di ambil yang relevan dengan penelitian yang di lakukan. Di dalam penelitian yang dilaksanakan.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang bisa di gunakan untuk mengumpulkan data penelitin. Wawancara ialah pendataan administrasi angket secara lisan dan langsung kepada masing- masing anggota sampel. Secara sederhana bisa di kategorikan bahwa wawancara ialah suatu kejadian atau bisa juga di sebut suatu proses interaksi antara sumber informasi dan pewawancara melewati komunikasi langsung dan bisa pula di sebut bahwa wawancara merupakan percakapan secara langsung antara sumber informasi dengan perawancara.²⁷ Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan beragam sudut pandang serta data yang berkaitan dengan tata kelola dan pengalaman para pengunjung. Melalui pelibatan berbagai perspektif dari pemangku kepentingan terkait, penelitian ini ditujukan agar mampu menghasilkan pemahaman yang holistik terkait dinamika serta sejumlah elemen yang berperan dalam proses peningkatan serta pelaksanaan operasional wisata religi Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah.

b. Observasi

Dalam konteks penelitian, observasi dapat dipahami sebagai upaya memusatkan perhatian pada objek yang diteliti dengan memanfaatkan seluruh kemampuan indra untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Observasi merupakan proses pengamatan secara langsung yang dilakukan

²⁶ Arikunto, S. (2010). Metode peneltian. *Jakarta: Rineka Cipta*, 173(2).hlm. 173.

²⁷ Makbul, M. (2021). Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian.Hlm. 10.

melalui indra peraba, pendengar, penglihat, pencium, dan dalam kondisi tertentu juga indra pengecap. Perangkat yang digunakan dalam teknik observasi dapat berupa lembar observasi, angket, tes, rekaman audio, maupun dokumentasi visual.

Pada penelitian kualitatif, observasi berperan sebagai metode pendukung dari teknik wawancara yang telah dilaksanakan sebelumnya. Melalui pendekatan kualitatif, observasi berfungsi untuk guna mengamati dan juga melihat secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti dapat menghimpun dan mencatat data yang di butuhkan guna memperkuat analisis penelitian. Pada penelitian kualitatif, peneliti juga dituntut untuk mengerti berbagai bentuk peninjauan serta peran yang dijalankan selama proses observasi berlangsung.²⁸ Dari observasi ini informasi yang di harapkan di peroleh adalah untuk memahami bagaimana penerapan *good governance* itu diterapkan dalam pengembangan suatu wisata religi pada kawasan wisata makam Ibu Agung Siti Ambariyah , dan juga mampu mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam usaha pengembangannya.

c. Dokumentasi

Penelitian yang menggunakan data skunder biasanya instrument pada pengumpulan datanya adalah dokumentasi, yang berarti barang-barang / data tertulis. Kata dokumen berasal dari Bahasa latin yaitu *dorece*, yang artinya mengajar. Pengertian dari kata dokumen yang pertama, bersumber dari data tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, peninggalan tertulis, artefak, peninggalan terlukis. Pengertian kedua di peruntuhkan untuk surat- surat negara dan surat- surat resmi seperti hibah, undang-undang, koseksi, perjanjian, serta yang lainnya. Pengertian dokumentasi yang lebih luas menyelimuti seluruh proses pembuktian yang bersumber dari berbagai jenis data, baik lisan, tulisan,

²⁸ Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). Instrumen pengumpulan data. Hlm. 9.

peninggalan arkeologis, maupun bentuk visual.²⁹ Pengumpulan berbagai dokumen, seperti rencana pengembangan serta laporan-laporan yang relevan, berfungsi sebagai penunjang dalam melakukan analisis lebih lanjut terhadap sistem pengelolaan pariwisata yang diimplementasikan pada wilayah tersebut. Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti berusaha memperoleh pemahaman yang presisi mengenai strategi dan usaha pengembangan wisata religi pada wilayah Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah.

4. Teknik analisis data

Instrumen yang digunakan penulis pada proses analisis data ialah penerapan metode analisis yang berpijak pada teori *good governance*. Penggunaan teknik analisis berbasis teori tersebut dimaksudkan untuk memahami bagaimana pengelolaan wisata religi Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah dilaksanakan. Metode ini dimanfaatkan untuk mengkaji serta menilai data yang diperoleh dengan mengacu pada kerangka teori yang sudah di aplikasikan. Pada penelitian ini, empat prinsip *good governance* dijadikan sebagai alat analisis terhadap data yang telah dihimpun. Selanjutnya, data tersebut digunakan sebagai landasan dalam penarikan kesimpulan dan penyajiannya pada bagian hasil penelitian.

a. Partisipasi

Guna Untuk mengetahui bentuk partisipasi, masyarakat perlu dilibatkan atau berperan aktif pada rangkaian pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung lewat lembaga perwakilan yang mampu menyalurkan aspirasi mereka. Keterlibatan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari perumusan keputusan hingga proses evaluasi. Pada penelitian ini, peneliti berupaya menghimpun data yang berkaitan dengan berbagai bentuk partisipasi masyarakat, seperti aktivitas-aktivitas yang

²⁹ Siregar, B. G. (2022). Instrumen Pengumpulan Data Dalam Penelitian. *Academia. Edu.* Hlm. 8.

dilakukan dalam memberikan kontribusi terhadap pengelolaan kawasan Makam Ibu Agung Siti Ambariyah.

b. Akuntabilitas

Guna mengetahui tingkat akuntabilitas, penulis menekankan pentingnya setiap pihak pengelola bertanggung jawab atas kewenangan, tindakan, serta sumber daya yang dikelola. Akuntabilitas mencakup sejauh mana pengelola baik itu pemerintah desa, lembaga keagamaan, maupun panitia pengelola makam dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan, pengambilan keputusan, serta penggunaan dana kepada masyarakat dan pihak terkait. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menghimpun berbagai data yang relevan dengan aspek akuntabilitas, mulai dari laporan keuangan sampai informasi mengenai perkembangan atau kemajuan pengelolaan kawasan wisata religi Makam Ibu Agung Siti Ambariyah.

c. *Rul of law* (Kepatuhan terhadap hukum)

Guna Untuk mengidentifikasi penerapan prinsip *rule of law*, penulis menetapkan sejumlah indikator penilaian, antara lain keterbukaan dalam proses hukum, tingkat kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dampak sosial serta ekonomi bagi masyarakat sekitar, dan adanya aturan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip *rule of law*, semacam peraturan dan kebijakan yang diterapkan di kawasan wisata religi Ibu Siti Fatimah Ambariyah.

d. Transparansi

Guna mengetahui tahapan transparansi, di sini penulis menetapkan bahwa indikator, yang berupa penyampaian kebijakan dan informasi yang lugas, penerapan kebijakan terbuka terhadap pengawasan, pengadaan akses informasi yang mudah untuk publik dalam mengakses dan

mengetahui seluruh kebijakan, serta pemberlakuan *check and balance*.³⁰. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan data yang berhubungan dengan transparansi, seperti cara pemerintah menyampaikan informasi mengenai pengelolaan kawasan wisata religi Ibu Siti Fatimah Ambariyah.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun gagasan secara teratur dan sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca. Penyusunan sistematika ini berorientasi guna menyajikan gambaran yang runtut dan jelas mengenai susunan bab yang disajikan secara berkesinambungan. Dengan adanya sistematika penulisan, penulisan skripsi diharapkan terhindar dari kesalahan penyusunan maupun kekeliruan dalam penyajian pembahasan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bagian utama, yaitu:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini berisi pembahasan mengenai pengertian *good governance*, prinsip-prinsip *good governance*, Prinsip-Prinsip POAC, serta pengelolaan wisata religi.

Bab III Hasil Penelitian, pada bab ini menguraikan gambaran umum Desa Bukur, Sejarah makam, gambaran kawasan wisata Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah, konsep Pengelolaan Wisata religi(POAC), dan hasil penelitian *good governance*

Bab IV Analisis Hasil Penelitian, pada bab ini menyajikan analisis penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan makam Ibu Agung Siti Ambariyah.

³⁰ Saputra, H. S. (2024). *Revitalisasi kawasan wisata pangeran purabaya surajaya sebagai objek wisata religi di Pemalang (Prespektif Good governance)* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).hlm. 14.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan berdasarkan temuan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis *Good governance* terhadap Pengelolaan Wisata Religi Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah di Desa Bukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan wisata religi Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah berdasarkan teori POAC telah berjalan cukup baik. Perencanaan dilakukan melalui musyawarah bersama, pengorganisasian ditunjukkan dengan pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan berjalan sesuai kebutuhan pengunjung dan kegiatan keagamaan, serta pengawasan dilakukan melalui koordinasi antara penjaga makam, BUMDes, dan pemerintah desa. Namun, sistem pelaporan dan pengawasan masih perlu ditingkatkan agar lebih terstruktur.
2. Berdasarkan perspektif *good governance*, prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan *rule of law* telah diterapkan dengan cukup baik. Masyarakat terlibat dalam kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi, terdapat mekanisme pertanggungjawaban kepada pemerintah desa, keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana dan kegiatan, serta pengelolaan yang berpedoman pada norma agama, norma sosial, dan hasil musyawarah desa. Meski demikian, masih diperlukan penguatan regulasi tertulis dan sistem administrasi yang lebih formal untuk meningkatkan kualitas tata kelola wisata religi.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Bukur diharapkan memberikan dukungan yang lebih besar dalam bentuk pembinaan, pendampingan, serta pengembangan sarana dan prasarana wisata religi. Pemerintah desa juga perlu memperkuat koordinasi dengan pengelola dan masyarakat dalam pengembangan wisata religi yang berkelanjutan.

2. Bagi Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan pengelolaan wisata religi, baik melalui pemberian saran, keterlibatan dalam kegiatan sosial-keagamaan, maupun dukungan terhadap program pengembangan wisata religi.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai wisata religi dengan menggunakan pendekatan yang lebih luas, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan destinasi wisata, maupun analisis keberlanjutan wisata religi berbasis masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2021). Pengelolaan Masjid Agung Islamic Center Sebagai Objek Wisata Religi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 43-48.
- Adinugraha, H. H., Fikri, M. K., & Andrean, R. (2025). Praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam Keberlanjutan Destinasi Pariwisata Religi di Kebumen. *Jurnal Semarak Kabumian*, 3(2). Hlm. 12-13.
- Akbar, I. F., Erwin, E., & Hidayatullah, A. (2022). Implementation of *Good governance* and Strategy for the Development of Religious Tourism of Prince Benowo's Cemetery in Improving the Economy of the People. *JKMD*, 68-81.
- Akbar, I. F., Erwin, E., & Hidayatullah, A. (2022). Implementation of *Good governance* and Strategy for the Development of Religious Tourism of Prince Benowo's Cemetery in Improving the Economy of the People. *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 4(2), 68-81.
- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). Instrumen pengumpulan data.
- Ardilla, I. P., & Mulyadi, A. W. E. (2022). Penerapan Prinsip *Good governance* dalam Pengelolaan Desa Wisata Sendang di Kabupaten Wonog. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(2), 317-331.
- Arhas, S. H., & Suprianto, S. (2020). The Effectiveness of 6M Implementation at Artebo MSME. *Jurnal Ad'ministrare*, 6(2)
- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Azkiya, D. (2024). *Analisis pengelolaan wisata religi untuk mengembangkan dakwah di makam Mbah Nur Durya Bin Sayyid Moga Pemalang* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Candra, M., & MH, C. (2024). *Birokrasi dan Good governance*. Prenada Media.
- Danar, O. R., Ap, S., & Ap, M. (2022). *Teori governance*. Deepublish.
- Gunawan, D., Fathurrahim, F., Jumail, M., & Mahsun, M. (2022). Pengelolaan Wisata Religi Sebagai Daya Tarik Wisata Di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Journal Of Responsible Tourism*, 2(1), 61-66.
- Hajar, S., Faustyna, F., & Haulik, K. (2022). Muslim-friendly tourism towards good tourism governance. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 142-161.
- Hanafi, M. (2015). Konsep dasar dan perkembangan teori manajemen. *M. Hanafi, Manajemen. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka*.

Handayani, K., Sulistyadi, Y., & Hasibuan, B. (2022, April). Optimalisasi Implementasi Prinsip-Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat di Pulau Wangi-Wangi. In *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* (Vol. 1, pp. 7-29).

Hariyoko, Y., Soesiantoro, A., & Pangestuti, R. P. (2021). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Wisata Religi di Kabupaten Gresik (Studi Wisata Makam Sunan Giri dan Situs Giri Kedaton). *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 13(1), 44-51.

Hermanto, kepala dusun 4, wawancara pribadi, bukur, 19 Mei 2026

Hidayah, N., Noorthaibah, N., & Nur, N. P. (2023). Strategi manajemen wisata religi di Kalimantan Timur (studi kasus makam Tunggang Parangan). *Mushawwir Jurnal Manajemen Dakwah dan Filantropi Islam*, 1(1), 1-19.

Hidayat, E., Pramono, T., Fachruddin, I., & Prissando, F. A. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(1), 29-40.

Hikmawati, F. (2020). Metodologi penelitian.

<https://bukur.web.id/> di akses pada tanggal 23 Mei 2026.

<https://bukurdesareligi.com/profil-des/> di akses pada tanggal 15 Mei 2026.

Ikhwan, M., & Agustina, Y. (2025). Manajemen Produksi Menggunakan Pendekatan 6M pada PT Ciomas Adisatwa Unit Pemalang. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 11(2).

Irawan, H. (2021). Peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)*, 6(01).

Islamiyah, M., & Holis, H. (2023). Potensi wisata religi Syaikhona Haulil Bangkalan pada pengembangan UMKM. *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, dan Antropologi*, 2(1), 29-38.

Karso, A. J. (2022). *Buku Ajar Good governance*. Samudra Biru.

Kearsipan, C. M. (2020). 1. Pengertian Manajemen. *Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*

- Khadry, M., Emrizal, E., & Syahputra, M. H. I. (2023). Implementasi Prinsip Community Based Tourism (CBT) dalam Pengelolaan Desa Wisata di Desa Tipang, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. *Manajemen dan Pariwisata*, 2(2).
- Khair, O. I. (2025). Unsur *Good governance*. *Dinamika Kemitraan Sektor Publik*, 25.
- Mahagangga, Oka. "Sistem Pengelolaan Terhadap Pura Tirta Empul Sebagai Daya Tarik Wisata Pusaka Di Tampak Siring Gianyar." *JURNAL DESTINASI PARIWISATA*.
- Mahfudz, M. (2023). Dampak Ekonomi terhadap Pengembangan Wisata Religi Masjid Al-Alam Kota Kendari. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(1), 260-270.
- Makbul, M. (2021). Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian.
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Al Huda, E. F. (2023). Penerapan sistem akuntabilitas publik dalam mewujudkan good governance di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2).
- Marlian, E. (2020). *Pengaruh Good Government Governance, Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Mendrofa, S. A., Yuliana, S., Mustanir, A., Oktaviane, D. P., Anita, D., Hakim, L., ... & Kusnadi, I. H. (2024). *Good governance Melalui Publik Digital*. Mega Press Nusantara.
- Nabila, J. P., & Mubarak, A. (2024). Pengelolaan Aspek Kenyamanan Amenitas Di Objek Wisata Pantai Air Manis Kota Padang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5).
- Nadilah, A. (2023). *Revitalisasi situs religi makam Pangeran Benowo di Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang (Prespektif Good governance)* (Doctoral dissertation, UIN KH ABDURAHMAN WAHID).
- Nuraini, P. (2023). Pengelolaan Objek Wisata Religi Makam Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(6), 1569-1581.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40-52.
- Ponco, pengelola makam, wawancara pribadi, bukur, 19 Mei 2026.

- Puspitasari, E., & Munna, N. (2021). Pengaruh unsur manajemen (6M) dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya. *Journal of Public Health Science Research (JPHSR)*, 2(2).
- Putra, J. A., Permata, D., Djani, A. I., Sabetu, D. L., Finit, Y. N., & Mas'ud, F. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip *Good governance* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Kesewenang-wenangan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(02).
- Putri, B. I., Astuti, A., & Afianta, A. Y. (2025, September). Transparansi dan Akuntabilitas: Peran Good Governance dalam Akuntansi Sektor Publik. In *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)* (Vol. 5, No. 2).
- Rahmadi, R. (2011). Pengantar metodologi penelitian.
- Rahman, L., & Hd, P. (2016). *Governance and Good governance: A theoretical framework. Public Policy and Administration Research*, 6(10).
- Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2019). Prinsip-prinsip kepariwisataan dan hak prioritas masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. *Kertha Wicaksana*, 13(2).
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sama'an, penjaga makam, wawancara pribadi, bukur, 19 Mei 2026.
- Saputra, H. S. (2024). *Revitalisasi kawasan wisata pangeran purbaya surajaya sebagai objek wisata religi di Pemalang (Prespektif Good governance)* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Saputra, Y. (2024). *Strategi Pengembangan Untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisata Religi (Studi Kasus Makam Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah Desa Bukur Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Sari, D. (2022). *Strategi Pengembangan Objek Wisata Religi (Studi Di Makam Teungku Diujung Desa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi).
- Satrio, D., Citradika, D. P., & Rakhmatika, D. (2025). Pendampingan Dalam Upaya Peningkatan Daya Tarik Wisata Religi Melalui Konten Video Pendek. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 3(4), 1180-1188.
- Singh, A. (2023). A theoretical understanding of governance and good governance. *VIDYA-A Journal of Gujarat University*, 2(1).

- Siregar, B. G. (2022). Instrumen Pengumpulan Data Dalam Penelitian. *Academia. Edu*.
- Sofyani, H., Ali, U. N. N. A., & Septiari, D. (2020). Implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan perannya terhadap kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 5(2).
- Suprihanto, J. (2018). *Manajemen*. UGM press.
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). Birokrasi & *good governance*.
- Teguh Jayeng Palindih, Kepala Desa Bukur, Wawancara Pribadi, Bukur, 19 Mei 2026.
- Temalagi, S., & Silooy, R. W. (2022). Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance pada desa di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 3(1).
- Vinata, J. N., & Puspawati, R. N. M. S. (2025). STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN WISATA KULINER DI PASAR LAMA TANGERANG. *Jurnal Hospitality dan Pariwisata*, 11(2).
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep *good governance* dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Zein, H. H. M., & Septiani, S. (2024). *Digitalisasi pemerintahan daerah: Katalis untuk integrasi dan optimasi good governance*. Sada Kurnia Pustaka.